

## ABSTRAK

**FirdausAlwa.2017.***Formulasi Model Demokrasi “( Studi Pada Pemekaran Kabupaten Bima )”*“( dibimbing oleh Muhlis Madani dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana formulasi model demokrasi dalam pemekaran Kabupaten Bima

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tipe fenomenologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena berdasarkan gejala yang terjadi di Kabupaten Bima. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 14 instansi pemerintah di 6 Kecamatan dan lembaga-lembaga lain yang terdiri dari Bupati, DPRD, Camat, LSM dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Formulasi Model Demokrasi dalam pemekaran kabupaten Bima Timur yaitu :

1. **Isukebijakan.** Maka perlu di lakukan pengefektifan pembinaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat serta pelayanan administrasi melalui pemekaran, pembinaan dan pelayanan selama ini belum dapat di lakukan secara maksimal mengingat jarak ibukota kabupaten bima yang baru dengan kecamatan-kecamatan di wilayah timur akan semakin jauh dan harus melewati daerah lain, yakni kota bima.
2. **Stakeholderforum** Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima timur (KPPKBT) KPPKBT. Lahir atau dibentuk pada tanggal 5 mei 2003 di IAIN Alauddin Makassar yang di motori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di makassar pada tanggal 6 oktober 2003. Dan ditagal 25 Agustus Tahun 2012 dibentuk lagi alat perjuangan yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPKBT) oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di bagian timur.
3. **Pembahasan kebijakan** Pembentukan Kabupaten Bima Timur bukan saja aspirasi dan harapan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Hal itu tertuang dalam Grand Desain Penataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2010-2025, tentang Rencana Pembentukan DOB di wilayah NTB, termasuk pembentukan Kabupaten Bima Timur.
4. **Perumusan Kebijakan** Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru (Bima Timur), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja.
5. **Pengesahan kebijakan** Pembentukan Bima Timur memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Bima bagian barat.
6. **Faktor pendukung** adalah ekonomiterkait pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana, seperti kantor bupati dan instansi vertikal lainnya.

**Kata kunci :** *Model Demokrasi Pemekaran*